
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN TAKALAR
MENURUT PENGELUARAN

2015-2019

<https://takalarkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TAKALAR**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN TAKALAR
MENURUT PENGELUARAN

2015-2019



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN TAKALAR
MENURUT PENGELUARAN 2015-2019**

ISBN :
Nomor Publikasi : 73050.2005
Katalog : 9302020.7305

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : vi + 56 halaman

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh :
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar

Dicetak Oleh :
CV BILAL JAYA MANDIRI

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar

TIM PENYUSUN / DRAFTING TEAM

Penanggungjawab Umum/*General in Charge*:

Abd. Haris, SE

Penyunting/*Editor*:

Sakir, S.E., M.M

Penulis/*Writer*:

Indo Egy Maulina, S.Tr.Stat

Pengolah Data/*Data Processor*:

Indo Egy Maulina, S.Tr.Stat

<https://takalar.kab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi “**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Takalar Menurut Pengeluaran 2015-2019**” ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, serta Ekspor Netto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

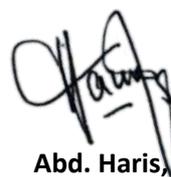
Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Takalar, Mei 2020

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Takalar,



Abd. Haris, S.E.

<https://takalarkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Kegunaan Statistik PDRB	4
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	14
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	16
2.5 Perubahan Inventori	21
2.6 Ekspor dan Impor	24
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN TAKALAR BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2015-2019	27
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Takalar Menurut Pengeluaran	29
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	33
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	34
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	35
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	36
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	37
3.7 Perkembangan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa	38
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2015-2019	41
4.1 PDRB (NOMINAL)	43
4.2 Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Rumah Tangga terhadap Ekspor	44
BAB V PENUTUP	45
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Takalar Menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Miliar Rp)	29
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Takalar Menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Miliar Rp)	30
Tabel 3	Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Takalar Menurut Pengeluaran 2015-2019 (Persen)	31
Tabel 4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Takalar Menurut Pengeluaran (Persen)	32
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Kabupaten Takalar Menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Persen)	32
Tabel 6	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Takalar, 2015-2019 (Persen)	33
Tabel 7	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Takalar, 2015-2019	34
Tabel 8	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Takalar, 2015-2019	35
Tabel 9	Perkembangan PMTB Kabupaten Takalar, 2015-2019	37
Tabel 10	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Takalar, 2015-2019	38
Tabel 11	Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Takalar, 2015-2019	39
Tabel 12	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Takalar, 2015-2019	43
Tabel 13	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2015-2019	44

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Takalar, 2015-2019 (Miliar Rupiah)	30

<https://takalarkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Takalar Menurut Pengeluaran 2015-2019	51
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010=100 Kabupaten Takalar Menurut Pengeluaran 2015-2019	52
Lampiran 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Takalar Menurut Pengeluaran 2015-2019	53
Lampiran 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010=100 Kabupaten Takalar Menurut Pengeluaran 2015-2019	54
Lampiran 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Kabupaten Takalar Menurut Pengeluaran 2015-2019	55
Lampiran 6	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Kabupaten Takalar Menurut Pengeluaran 2015-2019	56

BAB I

PENDAHULUAN

<https://takalarkab.bps.go.id>



1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik yang diukur atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi. PDRB pada dasarnya merupakan besaran nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau sama dengan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Secara sederhana PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Sehubungan dengan proses perubahan tahun dasar (*rebasings*), maka dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010, tentunya hal ini dimaksudkan agar kondisi ekonomi yang digambarkan mencerminkan ekonomi terkini. Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung PDRB, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Pengadaan Listrik dan Gas; 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6. Konstruksi; 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8. Transportasi dan Pergudangan; 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10. Informasi dan Komunikasi; 11. Jasa Keuangan dan Asuransi; 12. Real Estat; 13. Jasa Perusahaan; 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 15. Jasa Pendidikan; 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub kategori lapangan usaha.

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu

tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: 1. pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga; 2. pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga; 3. pengeluaran konsumsi akhir pemerintah; 4. pembentukan modal tetap bruto; 5. perubahan inventori; dan 6. ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka PDRB yang sama. Jadi, jumlah PDRB sisi pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan di PDRB lapangan usaha dan harus sama pula dengan PDRB yang merupakan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar daerah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan baik berupa ekspor maupun impor.

7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://takalarkab.bps.go.id>

<https://takalarkab.bps.go.id>

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://takalarkab.bps.go.id>



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol dan tembakau
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. *Furniture*, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Transportasi
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/ hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- a. Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*). Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- b. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri.
- c. Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain.
- d. Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- a. Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- b. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- c. Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- d. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan.
- b. Jumlah penduduk pertengahan tahun.
- c. Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu.
- d. Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditas tertentu. Hasil penghitungan tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah menyesuaikan Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu.
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP.
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*.
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP.

6. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke-4 dengan hasil poin ke-5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- a. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- b. pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- c. setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- d. kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- e. istilah non profit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output nonpasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output nonpasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- a. Hasil Survei Khusus Lembaga Nonprofit (SKLNP). Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- b. Hasil *up-dating* direktori LNPRT. Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- c. Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

b. Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} x_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah mempunyai peran dan fungsi lain di antaranya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi nonpasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan.
Contoh: aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh: aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan nonkomoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup: a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi atas dasar harga (adh) Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumus:

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output nonpasar} - \text{penjualan barang dan jasa}$$

Output nonpasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/ kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi atas dasar harga (adh) Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi suatu wilayah. Dalam kaitan ini, investasi yang dimaksud terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada besaran nilai komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset nonfinansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

- a. Output konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut lapangan usaha dari BPS Provinsi/Kab/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan nonmigas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Direktorat Jendral Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Metode “langsung” dilakukan dengan cara menghitung pembentukan modal (aset tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan metode “tidak langsung” dilakukan berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap kategori lapangan usaha. Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya termasuk biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Untuk barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di *deflate* (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai kategori lapangan usaha (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB atas dasar harga Berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (atas dasar harga Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan apabila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB atas dasar harga konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB atas dasar harga Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*inflate*”(dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB atas dasar harga konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB atas dasar harga

berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-deflate PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB atas dasar harga Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan atas dasar harga Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB atas dasar harga Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit dari PDRB pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB atas dasar harga Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Pada penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB atas dasar harga konstannya diperoleh dengan cara men-deflate nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit lapangan usaha jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i. Pendahuluan

Dalam konteks penghitungan PDRB komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto (PMB), atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut kategori lapangan usaha, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (material & supplies), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- a. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau mengunduh dari *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- b. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- c. Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- d. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- e. Data komoditas perkebunan;
- f. Indeks harga implisit PDRB kategori terpilih, dan
- g. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- h. Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung

adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaat, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori *adh berlaku*, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. menghitung posisi inventori *adh Konstan*, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- b. menghitung perubahan inventori *adh Konstan* dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- c. menghitung perubahan inventori *adh Berlaku* dengan *menginflate* perubahan inventori *adh Konstan* dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori *adh Berlaku* diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori *adh Konstan* dihitung dengan:

- a. Men-*deflate* nilai perubahan inventori *adh Berlaku* dengan indeks harga yang sesuai,
- b. Mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa:

- a. Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;

- b. Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- c. Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- d. Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6 EKSPOR DAN IMPOR

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah merupakan konsekuensi dari sistem ekonomi terbuka serta adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup. Ragam barang dan jasa yang masuk dalam pasar terkait *supply* dan *demand* diproduksi, serta disparitas harga menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut. Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://takalarkab.bps.go.id>

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN TAKALAR BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2015-2019



<https://takalarkab.bps.go.id>

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Takalar akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2015 - 2019, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Takalar digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN TAKALAR MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kabupaten Takalar menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun yang terlihat dari nilai PDRB yang terus meningkat. Peningkatan ekonomi ini juga menunjukkan adanya perbaikan taraf hidup masyarakatnya. Peningkatan ekonomi dapat digambarkan melalui nilai PDRB menurut harga berlaku maupun harga konstan setiap komponen, juga nilai total PDRB.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Takalar Menurut Pengeluaran 2015-2019 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rata	4.219,98	4.697,39	5.150,53	5.653,82	6.211,99
2. Konsumsi LNPRT	107,32	120,41	135,86	157,96	203,10
3. Konsumsi Pemerintah	954,20	985,66	1.023,48	1.131,29	1.319,44
4. PMTB	1.461,96	1.638,94	1.813,68	2.019,03	2.192,09
5. Perubahan Inventori	48,74	47,33	18,66	-90,38	82,59
6. Ekspor	2.169,60	2.352,83	2.566,06	2.806,80	3.000,15
7. Impor	2.139,30	2.092,19	2.149,27	2.353,69	2.852,03
PDRB	6.822,49	7.750,36	8.559,00	9.324,82	10.157,35

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Nilai PDRB Kabupaten Takalar (atas dasar harga berlaku) selama periode tahun 2015-2019 selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 10,16 triliun rupiah. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan peningkatan volume konsumsi baik oleh rumah tangga, LNPRT, maupun konsumsi oleh pemerintah.

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Takalar Menurut Pengeluaran 2015-2019 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rata	3.107,13	3.348,91	3.524,44	3.735,09	3.961,41
2. Konsumsi LNPRT	73,31	77,92	85,32	94,93	118,32
3. Konsumsi Pemerintah	625,75	618,83	622,62	655,86	737,11
4. PMTB	1.083,28	1.173,17	1.270,63	1.348,46	1.408,63
5. Perubahan Inventori	21,82	17,81	7,38	-26,98	29,03
6. Ekspor	1.542,41	1.508,75	1.746,04	1.829,33	1.912,47
7. Impor	1.522,15	1.340,07	1.452,48	1.446,01	1.550,71
PDRB	4.931,54	5.405,32	5.803,94	6.190,67	6.616,25

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 yaitu produk barang dan jasa diukur dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas saja, tanpa ada pengaruh perubahan harga. Dengan kata lain PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, karena hanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2015–2019, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Takalar berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Tabel 2. di atas. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Gambar 1).

Gambar 1. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Takalar Menurut Pengeluaran 2015 – 2019 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPS 2020 (diolah)

Dari **Gambar 1**, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Sementara dalam perhitungan PDRB atas dasar harga Konstan pengaruh harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. Kontribusi masing-masing komponen pengeluaran ini terhadap total PDRB dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Takalar Menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rata	61,85	60,61	60,18	60,63	61,16
1. Konsumsi LNPRT	1,57	1,55	1,59	1,69	2,00
2. Konsumsi Pemerintah	13,99	12,72	11,96	12,13	12,99
3. PMTB	21,43	21,15	21,19	21,65	21,58
4. Perubahan Inventori	0,71	0,61	0,22	-0,97	0,81
5. Net Ekspor	0,44	3,36	4,87	4,86	1,46
Ekspor	31,80	30,36	29,98	30,10	29,54
Dikurangi impor	31,36	26,99	25,11	25,24	28,08
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Selama periode 2015–2019, produk yang diproduksi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan total konsumsi akhir baik konsumsi rumah tangga, LNPRT maupun pemerintah yakni dengan kontribusi di atas 70 persen. Konsumsi akhir terbesar masih digerakkan oleh konsumsi akhir rumah tangga dengan kontribusi antara 60 hingga 62 persen, kemudian dilanjutkan oleh konsumsi akhir pemerintah yang berkisar antara 12 hingga 13 persen.

Pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran cukup tinggi dengan kontribusi sekitar 21-22 persen. Di sisi lain, ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, tetapi besarnya ekspor ini diikuti juga peran impor yang cukup besar, sehingga secara neto kurang dari dua (2) persen. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan perdagangan Kabupaten Takalar dalam periode tahun 2015–2019 selalu dalam posisi “surplus” atau sebagian kebutuhan domestik sudah dapat dipenuhi oleh produk regional sendiri bahkan mampu mengirimkan produk ke luar wilayah Takalar (ekspor). Hal ini dapat terlihat dari net ekspor yang bernilai positif.

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Takalar Menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)
1. Konsumsi Rata	7,07	7,78	5,24	5,98	6,06
2. Konsumsi LNPRT	3,02	6,29	9,50	11,26	24,63
3. Konsumsi Pemerintah	7,71	-1,11	0,61	5,34	12,39
4. PMTB	7,68	8,30	8,31	6,12	4,46
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	8,42	9,61	7,37	6,66	6,87

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar dari tahun 2015 sampai dengan 2019 secara rata-rata mencapai 7,79 persen, dengan masing-masing pertumbuhan 8,42 persen (2015) ; 9,61 persen (2016); 7,37 persen (2017); 6,66 persen (2018) dan 6,87 persen (2019). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 9,61 persen, sebaliknya yang terendah justru terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 6,66 persen. Perlambatan yang terjadi pada tahun 2018 bisa dijelaskan dari pembentukan PMTB dan perdagangan ekspor barang dan jasa yang mengalami perlambatan cukup signifikan dari tahun 2017 ke 2018.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Takalar Menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rata	135,82	140,27	146,14	151,37	156,81
2. Konsumsi LNPRT	146,40	154,53	159,24	166,39	171,66
3. Konsumsi Pemerintah	152,49	159,28	164,38	172,49	179,00
4. PMTB	134,96	139,70	142,74	149,73	155,62
5. Perubahan Inventori	223,36	265,72	252,79	334,96	284,51
6. Ekspor	140,66	155,95	146,96	153,43	156,87
7. Impor	140,54	156,13	147,97	162,77	183,92
PDRB	138,34	143,38	147,47	150,63	153,52

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Sementara itu, indeks implisit PDRB menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Hal ini berarti bahwa dari tahun ke tahun kenaikan harga semakin tinggi.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, di mana lebih dari 60 persen produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Takalar, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	4.219,98	4.697,39	5.150,53	5.653,82	6.211,99
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	3.107,13	3.348,91	3.524,44	3.735,09	3.961,41
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	61,85	60,61	60,18	60,63	61,16
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	14.708,58	16.199,11	17.579,62	19.107,70	20.797,60
b. ADHK 2010	10.829,79	11.548,85	12.029,49	12.623,14	13.262,70
Pertumbuhan ¹					
a. Total konsumsi RT	7,07	7,78	5,24	5,98	6,06
b. Perkapita	5,90	6,64	4,16	4,94	5,07
Jumlah penduduk (orang)	286.906	289.978	292.983	295.892	298.688

Ket : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2015 – 2019 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk Kabupaten Takalar. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Faktor lain yang mendorong konsumsi adalah gaya hidup yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.

PDRB Kabupaten Takalar lebih dari setengahnya (sekitar 60-63 persen) digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, porsi tertinggi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 61,85 persen. Porsi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun dimana

¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 60,18 persen dan meningkat di 2018 (60,63 persen) dan 2019 (61,16 persen).

Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. Secara umum, rata-rata konsumsi perkapita terus meningkat dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Pada tahun 2015, secara umum setiap penduduk di Kabupaten Takalar menghabiskan dana sekitar 14,71 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan sebagainya). Besaran ini pada tahun 2019 meningkat menjadi sekitar 20,80 juta rupiah.

Secara keseluruhan, terdapat fluktuasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan sejak tahun 2015. Pada tahun 2015, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 7,07 persen dan terus meningkat hingga 7,78 persen pada tahun 2016. Angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini melambat di tahun 2017 menjadi 5,24 persen dan kembali meningkat hingga tahun 2019 menjadi 6,06 persen. Demikian pula pertumbuhan konsumsi per kapita yang terdapat peningkatan dan penurunan sepanjang lima tahun terakhir.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Komponen konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minim peranannya dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Meskipun demikian, LNPRT tetap memiliki peranan yang penting dalam perekonomian suatu wilayah.

Tabel 7. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Takalar, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	107,32	120,41	135,86	157,96	203,10
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	73,31	77,92	85,32	94,93	118,32
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,57	1,55	1,59	1,69	2,00
Pertumbuhan	3,02	6,29	9,50	11,26	24,63

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Sekitar satu sampai dua persen dari PDRB Kabupaten Takalar digunakan untuk pengeluaran konsumsi lembaga rumah tangga yang melayani rumah tangga seperti panti asuhan, partai politik,

lembaga keagamaan, LSM, dan lain-lain. Meskipun hanya mengambil porsi pada kisaran 1,50 hingga 2,00 persen, keberadaan LNPRT tetap memiliki andil terhadap pembentukan PDRB di Kabupaten Takalar. Lembaga yang sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan konsumsi LNPRT adalah partai politik yang ketika ada momentum khusus seperti pemilu, seperti yang diselenggarakan saat tahun 2017 untuk pemilihan Bupati, memberikan nilai pertumbuhan yang relatif besar. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi LNPRT tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 24,63 persen. Hal ini disebabkan tahun 2019 terdapat pemilihan presiden dan pemilihan legislatif sehingga aktifitas partai politik dan lembaga lainnya mengalami peningkatan signifikan. Partai politik semakin gencar melakukan kegiatan kampanye, begitu pula ormas-ormas pendukung capres-cawapres atau partai tertentu semakin menggiatkan aktivitasnya.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Selain konsumsi rumah tangga dan LNPRT, konsumsi akhir pemerintah termasuk bagian dari konsumsi akhir dalam perekonomian suatu wilayah. Pemerintah merupakan salah satu institusi yang mempunyai peran ganda, di samping sebagai produsen jasa pemerintah juga bertindak sebagai konsumen serta regulator dalam proses perekonomian.

Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Takalar, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	954,20	985,66	1.023,48	1.131,29	1.319,44
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	625,75	618,83	622,62	655,86	737,11
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	13,99	12,72	11,96	12,13	12,99
Konsumsi Pemerintah per-kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	3.325,82	3.399,09	3.493,31	3.823,31	4.417,45
b. ADHK 2010	2.181,03	2.134,04	2.146,56	2.216,55	2.467,83
Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi pemerintah	7,71	-1,11	0,61	5,34	12,39
b. Konsumsi perkapita	6,53	-2,15	-0,42	4,30	11,34
Jumlah penduduk (org)	286.906	289.978	292.983	295.892	298.688

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

2015, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 954,20 miliar rupiah, yang terus meningkat hingga pada tahun 2019 nilainya mencapai 1,32 triliun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan nilai nominal pada masing-masing tahun, kecuali 2016.

Proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB selama lima tahun terakhir relatif stabil pada kisaran 12-14 persen dan proporsi tertinggi ada di tahun 2015 yaitu sebesar 13,99 persen. Sepanjang periode tersebut, proporsi pengeluaran konsumsi pemerintah terus mengalami penurunan, hingga pada tahun 2017 hanya mencapai 11,96 persen dan sedikit meningkat menjadi 12,13 persen pada 2018 dan 12,99 pada 2019.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Seiring dengan penghitungan konsumsi pemerintah, secara rata-rata konsumsi pemerintah perkapita juga menunjukkan kondisi yang sama. Pada tahun 2015, konsumsi pemerintah perkapita atas dasar harga berlaku adalah sebesar 3,32 juta rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 4,42 juta rupiah.

Seiring dengan peningkatan nilai pengeluaran konsumsi pemerintah, nilai pengeluaran konsumsi pemerintah perkapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata per penduduk. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)³. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB Tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Secara keseluruhan, pengeluaran PMTB atas dasar harga berlaku dan

³ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

harga konstan tahun 2010 selalu mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, total pengeluaran PMTB atas dasar harga berlaku sebesar 1,46 triliun rupiah atau 21,43 persen dari total PDRB Takalar. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 2,19 triliun rupiah pada tahun 2019. Peran pengeluaran PMTB pada PDRB Takalar juga mengalami sedikit peningkatan menjadi 21,58 persen.

Tabel 9. Perkembangan PMTB Kabupaten Takalar, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.461,96	1.638,96	1.813,68	2.019,03	2.192,09
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.083,28	1.173,17	1.270,63	1.348,46	1.408,63
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	21,43	21,15	21,19	21,65	21,58
Pertumbuhan ⁴ (%)	7,68	8,30	8,31	6,12	4,46

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Berdasarkan Tabel 9, pada tahun 2015 PMTB menurut harga konstan 2010 sebesar 1,08 triliun rupiah. Nilai ini selalu mengalami peningkatan atau pertumbuhan positif hingga pada tahun 2019 PMTB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 1,41 triliun rupiah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 8,31 persen. Pada tahun berikutnya, pertumbuhan PMTB mengalami perlambatan hingga pada tahun 2019 pertumbuhannya hanya sebesar 4,46 persen. Hal ini sejalan dengan melambatnya aktivitas lapangan usaha konstruksi yang ada di Kabupaten Takalar.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan diakhir periode dibanding awal periode. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan baik. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung

⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Takalar, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Perubahan Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	48,74	47,33	18,66	-90,38	82,59
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	21,82	17,81	7,38	-26,98	29,03
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,71	0,61	0,22	-0,97	0,81

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tahun 2015 nilai Perubahan Inventori atas dasar harga berlaku sebesar 48,74 miliar rupiah. Nilai tersebut berfluktuasi hingga pada akhirnya mengalami penurunan yang signifikan dari 47,33 miliar di 2016 menjadi 18,66 miliar di tahun 2017 dan kembali turun menjadi -90,38 miliar di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya persediaan (inventori) di akhir tahun 2018 lebih sedikit dibanding persediaan di awal tahun. Nilai PDRB atas harga konstan 2010 pada tahun 2015 sebesar 21,82 miliar rupiah, secara terus menerus mengalami penurunan hingga pada tahun 2018 menjadi -26,98 miliar rupiah dan kembali meningkat menjadi 29,03 miliar rupiah di tahun 2019. Secara proporsi, perubahan Inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Takalar cukup rendah, berada di bawah 1 persen sepanjang tahun 2015 hingga 2019.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Takalar, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain maupun luar negeri baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah Kabupaten Takalar yang berasal dari wilayah/ kabupaten lain. Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa ketergantungan Kabupaten Takalar terhadap ekonomi atau

produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi, tetapi tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar daerah menjadikan komponen ini (dalam series PDRB atas dasar harga Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor-impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Tabel 11. Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Takalar, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net ekspor barang dan jasa					
a. ADHB (miliar rupiah)	30,30	260,64	416,79	453,11	148,13
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	20,26	168,68	293,56	383,32	361,76
Proporsi Net Ekspor terhadap PDRB (%- ADHB)	0,44	3,36	4,87	4,86	1,46

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa net ekspor sepanjang tahun 2015-2019 selalu bernilai positif. Artinya, ekspor barang dan jasa yang dilakukan oleh Kabupaten Takalar ke wilayah lebih besar

dibandingkan dengan nilai impornya. Meskipun demikian, nilai net ekspor cukup berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 hingga 2018, nilai net ekspor atas dasar harga berlaku selalu mengalami peningkatan dari 30,30 miliar rupiah menjadi 453,11 miliar rupiah. Namun, pada tahun 2019 net ekspor atas dasar harga berlaku di Kabupaten Takalar mengalami penurunan menjadi 148,13 miliar rupiah. Sama halnya dengan net ekspor atas dasar konstan 2010, pada tahun 2015 sebesar 20,26 miliar rupiah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga menjadi 383,32 miliar rupiah pada tahun 2018 dan kemudian sedikit mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 361,76 miliar rupiah. Pada tahun 2015-2019, proporsi net ekspor terhadap PDRB Kabupaten Takalar juga cukup berfluktuatif dibawah 5 (lima) persen.

<https://takalarkab.bps.go.id>

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2015-2019

<https://takalarkab.bps.go.id>



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Takalar, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	6.822,49	7.750,36	8.559,00	9.324,82	10.157,35
- ADHK 2010	4.931,54	5.405,32	5.803,94	6.190,67	6.616,25
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	23.779,55	26.727,41	29.213,31	31.514,28	34.006,55
- ADHK 2010	17.188,71	18.640,45	19.809,83	20.922,07	22.151,05
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	7,23	8,45	6,27	5,61	5,87
Jumlah penduduk	286.906	289.978	292.983	292.982	298.688
Pertumbuhan	1,11	1,07	1,04	0,99	0,94

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

PDRB perkapita Kabupaten Takalar menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 12), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Takalar rata-rata mampu menghasilkan nilai tambah sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Secara rata-rata, penduduk Kabupaten Takalar mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar 34,00 juta rupiah. Sementara itu, pertumbuhan perkapita secara “riil” cenderung mengalami perlambatan. Dari Tahun 2015-2019, pertumbuhan perkapita tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 8,45 persen, nilai ini cenderung melandai perlambatan hingga pada tahun 2019 pertumbuhan perkapita di Kabupaten Takalar sebesar 5,87 persen.

4.2 PERBANDINGAN PENGGUNAAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kabupaten Takalar (lebih dari 50 persen), yang artinya bahwa seluruh produk barang dan jasa baik yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Takalar maupun yang berasal dari impor sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 13. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	4.219,98	4.697,39	5.150,53	5.653,82	6.211,99
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	2.169,60	2.352,83	2.566,06	2.806,80	3000,15
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,95	2,00	2,01	2,01	2,07

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Data di atas menunjukkan bahwa produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga secara rata-rata lebih besar dari nilai ekspor. Rasio perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap ekspor cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2015-2019, yang disebabkan karena peningkatan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga. Tabel 13 menunjukkan bahwa pada tahun 2015, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga 1,95 kali lebih banyak dibanding produk yang diekspor. Sementara itu, pada tahun 2019 konsumsi rumah tangga menjadi 2,07 kali lebih besar dibanding ekspor. Hal ini berarti bahwa Sebagian besar penyediaan (*supply*) domestic diserap untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

<https://takalar.kab.bps.go.id>



<https://takalarkab.bps.go.id>

PDRB menurut penggunaan tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Takalar pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.

Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.

Data disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2015 sampai dengan 2019, sehingga lebih mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.

Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri) dan Tabel Input-Output.

<https://takalarkab.bps.go.id>

Lampiran

<https://takalarkab.bps.go.id>



**Lampiran 1. PDRB Kabupaten Takalar Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2015- 2019 (Juta Rupiah)**

Komponen	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.219.979,38	4.697.386,66	5.150.531,21	5.653.815,95	6.211.994,57
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	107.321,25	120.409,76	135.864,94	157.958,55	203.100,29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	954.198,47	985.661,92	1.023.479,59	1.131.288,13	1.319.440,57
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.461.958,11	1.638.935,43	1.813.679,28	2.019.029,25	2.192.094,82
5. Perubahan Inventori	48.738,98	47.327,29	18.657,65	- 90.380,26	82.591,49
6. Net Ekspor	30.298,56	260.638,95	416.791,92	453.110,36	148.125,21
6.a. Ekspor Barang dan Jasa	2.169.602,83	2.352.828,89	2.566.064,96	2.806.798,14	3.000.151,98
6.b. Impor Barang dan Jasa	2.139.304,27	2.092.189,94	2.149.273,05	2.353.687,78	2.852.026,77
PDRB	6.822.494,75	7.750.360,01	8.559.004,60	9.324.821,98	10.157.346,94

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Lampiran 2. PDRB Kabupaten Takalar Atas Dasar Harga konstan
Tahun 2015 - 2019 (Juta Rupiah)**

Komponen	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.107.131,33	3.348.911,56	3.524.435,11	3.735.087,61	3.961.408,87
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	73.308,42	77.919,51	85.320,94	94.931,35	118.317,15
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	625.751,60	618.825,84	622.6215,01	655.859,71	737.111,13
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.083.276,75	1.173.168,05	1.270.629,78	1.348.455,75	1.408.631,18
5. Perubahan Inventori	21.820,36	17.810,85	7.380,55	- 26.982,45	29.029,57
6. Net Ekspor	20.255,74	168.684,56	293.562,92	383.322,14	361.755,85
6.a. Ekspor Barang dan Jasa	1.542.408,67	1.508.752,79	1.746.045,45	1.829.333,97	1.912.466,90
6.b. Impor Barang dan Jasa	1.522.152,93	1.340.068,22	1.452.482,53	1.446.011,83	1.550.711,06
PDRB	4,931,544.19	5,405,320.37	5.803.944,31	6.190.674,12	6.616.253,76

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Lampiran 3. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Takalar Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2015 - 2019 (Persen)**

Komponen	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	61,85	60,61	60,18	60,63	61,16
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,57	1,55	1,59	1,69	2,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,99	12,72	11,96	12,13	12,99
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	21,43	21,15	21,19	21,65	21,58
5. Perubahan Inventori	0,71	0,61	0,22	-0,97	0,81
6. Net Ekspor	0,44	3,36	4,87	4,86	1,46
6.a. Ekspor Barang dan Jasa	31,80	30,36	29,98	30,10	29,54
6.b. Impor Barang dan Jasa	31,36	26,99	25,11	25,24	28,08
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Takalar Atas Dasar Harga Konstan (2010=100)
Tahun 2015 - 2019 (Persen)

Komponen	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,07	7,78	5,24	5,98	6,06
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,02	6,29	9,50	11,26	24,63
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,71	-1,11	0,61	5,34	12,39
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,68	8,30	8,31	6,12	4,46
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
6.a. Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
6.b. Impor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	8,42	9,61	7,37	6,66	6,87

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Tahun 2015 - 2019 (Persen)**

Komponen	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	135,82	140,27	146,14	151,37	156,81
2, Pengeluaran Konsumsi LNPRT	146,40	154,53	159,24	166,39	171,66
3, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	152,49	159,28	164,38	172,49	179,00
4, Pembentukan Modal Tetap Bruto	134,96	139,70	142,74	149,73	155,62
5, Perubahan Inventori	223,36	265,72	252,79	334,96	284,51
6. Net Ekspor	149,58	154,51	141,98	118,21	40,95
6.a. Ekspor Barang dan Jasa	140,66	155,95	146,96	153,43	156,87
6.b. Impor Barang dan Jasa	140,54	156,13	147,97	162,77	183,92
PDRB	138,34	143,38	147,47	150,63	153,52

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto
(2010=100) Tahun 2015 - 2019 (Persen)**

Komponen	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,79	3,28	4,19	3,58	3,60
2, Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,43	5,56	3,05	4,49	3,16
3, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,83	4,45	3,20	4,93	3,78
4, Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,37	3,52	2,17	4,90	3,93
5, Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
6.a. Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
6.b. Impor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	6,99	3,64	2,85	2,13	1,92

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TAKALAR**

Jalan Syech Yusuf No. 5 Takalar, 92211

Email : bps7305@bps.go.id Homepage: <http://takalarlab.bps.go.id>